

Gerakan Sosial Keagamaan Pendidikan Islam Masa Kolonialisme

Mujianto Solichin, M. Ansor Anwar

Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang

Email: mujiantosolichin@fai.unipdu.ac.id

Abstract: Historically, Ulama play an important role in religious-social movement and Islamic education. They have well established social and intellectual basis in maintaining their key position to spread Islam in Indonesia. During Islamic Monarchy throughout pre-colonialism in archipelago, their key positions have been described an elite religious leader and being a part of the ruler at that period. At the beginning, the Dutch as the colonialist, did not interfere on Islamic education system. However, step by step they interfered by giving pressure and confronting on the monarchy power, especially religious social institution. During colonialism period, the growth of religious social institution, therefore has led to the establishing of religious authority. Furthermore, this become institutional basis for the ulema to spread Islam. Moreover, they also have important contributions in religious practice, build up religious social movement, including Islamic education in their regions. During 17 till 19 century, as mecca became the religious spirit in east Hindia, their networking with ulema from Middle East intensively spread the intellectual kernel as well as building Islamic transmission. They use their intellectual to spread the Islam across archipelago.

Keyword: Colonialism, religious social movement, Islamic education.

Abstrak: Ulama sebagai tokoh kunci gerakan sosial-keagamaan dan pendidikan Islam secara historis memiliki fondasi intelektual dan sosial yang mapan dalam mempertahankan posisi penting mereka bagi penyebaran Islam di Indonesia. Peran penting mereka pada periode kerajaan-kerajaan Islam Nusantara masa pra-kolonialisme digambarkan sebagai elite agama dan menjadi bagian dari elite yang berkuasa di kerajaan. Pemerintah kolonialisme Belanda pada awalnya tidak turut campur terhadap sistem pendidikan Islam di kalangan masyarakat Muslim Nusantara. Namun, setahap demi setahap pemerintah kolonial mulai memperlihatkan tekanan dan serangan terutama terhadap kekuasaan kerajaan termasuk pula terhadap lembaga sosial keagamaannya. Pertumbuhan lembaga-lembaga sosial keagamaan pada masa kolonialisme pada gilirannya membentuk otoritas keagamaan, dan menjadikan ulama memiliki fondasi institusionalnya sendiri dalam mendefinisikan Islam. Ulama kembali tampil sebagai ahli tunggal Islam yang berkontribusi dalam praktek-praktek keagamaan, membina gerakan sosial keagamaan termasuk pendidikan Islam di wilayah mereka masing-masing. Abad ke-17 hingga 19, ketika Makkah menjadi “jantung kehidupan keagamaan di kepulauan Hindia Timur,” jaringan ulama dengan Timur Tengah semakin intensif menyemai benih-benih intelektualisme dan membangun basis bagi transmisi Islam. Mereka mengembara dalam lingkaran tradisi intelektual ilmiah kemudian mentransmisikannya ke penjuru Nusantara.

Kata kunci: Kolonialisme, gerakan sosial keagamaan, pendidikan Islam.

Pendahuluan

Perasaan keterasingan, kebingungan dan tidak puas terhadap sistem pendidikan yang diciptakan pemerintah Kolonial Hindia Belanda, membias pada pola pemikiran kaum intelektual pemimpin-pemimpin

agama (ulama). Benturan antara kebudayaan bangsa dengan kebudayaan Belanda dan ditambah dengan penindasan kolonialisme terhadap masyarakat Indonesia, pada akhirnya melahirkan kesadaran mereka tentang peranan apa yang harus dimainkan untuk mengatasi keadaan itu.¹

Reaksi yang muncul di kalangan ulama bisa dikelompokkan menjadi *dua*: reaksi *pertama*, berupa tindakan mengisolasi diri dari pengaruh sistem pengajaran sekolah Belanda, karena dinilai akan merugikan pendidikan Islam. Sedangkan reaksi *kedua*, berupa usaha memodernisasi institusi pendidikan Islam yang ada sebagai saingan bagi sekolah-sekolah milik pemerintah Hindia Belanda.² Munculnya reaksi tersebut, mungkin terjadi juga di berbagai negara yang berpenduduk Muslim yang menjadi koloni penjajah.

Gerakan kolonialisme Belanda di Indonesia adalah ekspansi kapitalisme; komoditas dan pasar. Perlawanan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat pun tidak lepas dari reaksi terhadap gerakan kolonialisme; perlawanan terhadap penguasaan Belanda terhadap kekuasaan lokal dan negara di Nusantara, penolakan terhadap sistem administrasi pemerintahan Belanda, perlawanan terhadap agresi militer Belanda yang merangsek ke daerah-daerah tidak taat terhadap pemerintahan kolonial, perlawanan kelompok Islam murni terhadap budaya Barat yang membentur religiusitas dan diinfiltrasikan ke komunitas lokal, perlawanan-perlawanan dari organisasi berbasis agama Islam terhadap Belanda adalah penolakan terhadap politik kolonial dan perembesan nilai kontra produktif terhadap agama Islam. Organisasi-organisasi berbasis Islam yang melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda pada tahun 1930-an dan 1940-an semakin besar dan tidak terlepas dari tingkat konsistensi keagamaan rakyat. Organisasi berbasis Islam, seperti Pemuda Anshor, Sabi'lillah, Masjumi dengan Hizbu'llah yang nantinya menjadi Tentara Islam Indonesia (TII).³

Lahirnya gerakan organisasi-organisasi sosial keagamaan Islam di masa kolonialisme merupakan luapan menemukan identitas yang bersifat legalisme dan formalisme Islam di Indonesia. Semua itu tidak muncul begitu saja dari ruang kosong. Kiprah Islam selain bergerak di ruang sosial keagamaan pendidikan Islam juga bersinggungan langsung dengan politik di negara ini. Bila kiprah Islam dalam gerakan politik dalam rangka menemukan sebuah format baru legalitas atau formalitas Islam-negara, maka gerakan sosial keagamaan pendidikan Islam menjadi lahan

¹Alfian, *Transformasi Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta: UI Press, 1986), 88.

²Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara 2008), 63.

³Lambang Trijono, dkk (Ed.), *Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik di Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2004), 350.

penyemaian nilai-nilai atau ideologi keislaman.⁴ Selanjutnya secara deskriptif-eksploratif tulisan ini mencoba mengurai “gerakan sosial keagamaan pendidikan Islam masa kolonialisme.”

Kolonialisme dan Gerakan Sosial-Keagamaan di Indonesia

Peran Ulama dan Embrio Lahirnya Gerakan Sosial-Keagamaan dalam Lingkaran Kolonialisme

Konsep kolonialisme Hindia Belanda yang dimulai abad ke-19 disiapkan oleh Herman Daendels (1808-1811) untuk mempertegas pengelolaan wilayah koloni yang sebelumnya hanya merupakan mitra perdagangan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Ini merupakan tanda terbentuknya struktur masyarakat kapitalistik yang sejalan dengan zaman liberalisme dimana investasi dikelola oleh swasta asing Eropa. Sejak tahun 1830 muncul konflik perburuhan di berbagai tempat termasuk masyarakat pedesaan. Sebenarnya ini tidak lebih disebabkan oleh faktor belum adanya tanda-tanda keberhasilan organisasi modern seperti serikat, partai,⁵ atau gerakan sosial keagamaan dalam rangka memperjuangkan hak-hak rakyat.

Kolonialisme yang merundung negeri ini hingga 350 tahun mengakibatkan geliat intelektualisme Islam di Nusantara terhambat perkembangannya. Pusat-pusat sosial keagamaan pendidikan Islam mengalami pergeseran wilayah dari kota ke desa-desa. Kota pada masa itu menjadi basis pemerintahan kolonial. Namun demikian Islam Nusantara tetap bertahan dan kokoh berdiri berkat dukungan masyarakat di desa-desa. Institusi mungil ini berkontemplasi dalam bentuk lembaga sosial keagamaan tasawuf dan tarekat. Dalam perkembangan selanjutnya, didirikanlah pesantren dan madrasah dalam rangka transformasi dan pengembangan ilmu-ilmu Islam.⁶

Ulama sebagai tokoh kunci gerakan sosial-keagamaan dan pendidikan Islam secara historis memiliki fondasi intelektual dan sosial yang mapan dalam mempertahankan posisi penting mereka dalam Islam di Indonesia. Pada periode kerajaan-kerajaan Islam Nusantara masa pra-kolonialisme, ulama memainkan peranan penting sebagai hakim (*qāḍī*), dan *Shaykh al-*

⁴Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), 332.

⁵Edi Cahyono, *Zaman Bergerak di Hindia Belanda* (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2003), 1. Buku ini secara khusus menelusuri perjuangan Mas Marco, Semaoen dan lain-lain memperjuangkan aspirasi rakyat dalam bentuk organisasi atau serikat buruh tempo doeloe.

⁶Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Memandu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009), 59.

Islām. Karakteristik ulama pada periode ini berperan sebagai elite agama dan menjadi bagian dari elite yang berkuasa di kerajaan.⁷

Sebagaimana dijelaskan di atas mengenai kehadiran perusahaan-perusahaan Barat khususnya Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) menyebabkan runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa inilah, ulama mengalami transformasi dari pejabat di kerajaan menjadi pemimpin lembaga pendidikan Islam yang mereka kembangkan di luar wilayah kekuasaan kerajaan. Para ulama selanjutnya mendirikan pesantren di Jawa, surau di Minangkabau, dan dayah di Aceh. Institusi-institusi ini menjadi pusat-pusat pengembangan intelektual klasik bagi kaum Muslim, dan tersebar di beberapa daerah.⁸

Periode kolonialisme menjadi momen penting bagi Indonesia khususnya sejarah ulama yang dikemudian hari berkontribusi besar dalam pembentukan gerakan sosial keagamaan dan pendidikan bersama-sama tokoh kunci pergerakan lainnya. Periode kolonial sejumlah institusi Muslim seperti pesantren, surau dan dayah berkembang pesat. Sementara itu, jaringan dengan Timur Tengah semakin intensif,⁹ yang kemudian berakibat pada munculnya Makkah sebagai jantung Islam Indonesia. Semua ini terjadi karena terkait kebijakan Islam masa kolonial Belanda. Periode ini juga menjadikan pemicu berkembangnya ulama sebagai sebuah komunitas tersendiri yang berbeda dari elite agama yang didukung Belanda, misalnya penghulu.¹⁰

Proses perkembangan ulama sebagai garda depan gerakan sosial keagamaan dan pendidikan Islam menjadi “yang lain” (*the other*), ini selanjutnya diperkuat dengan gerakan reformisme Islam, yang mendorong ulama tampil sebagai komunitas yang secara sadar mengidentifikasi diri mereka sendiri melalui sikap sosial dan bahasa agama yang khas.¹¹

Menurut Jajat Burhanudin, ulama di masa ini (kolonialisme) khususnya studi yang dilakukan Azra: “Ulama Jaringan Timur Tengah”, di sini ulama berfungsi sebagai sumber tradisi intelektual, menjadi landasan dasar bagi mereka yang terlibat dalam penerjemahan Islam di arena kolonial Indonesia dan peran mereka dalam membentuk otoritas keagamaan di tengah-tengah Muslim Indonesia. Berbeda lagi studi yang dilakukan Deliar Noer: “The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942”, Noer mendeskripsikan secara detail tentang “modernisme

⁷Jajat Burhanuddin, *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia* (Mizan Publika: Jakarta Selatan, 2012), 7, 10-11.

⁸Ibid.

⁹Lihat misalnya karya Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998).

¹⁰Jajat Burhanuddin, *Ulama dan Kekuasaan*, 7, 10-11.

¹¹Ibid., 7.

Islam”, yang dipahami dengan berdirinya organisasi Islam modern Muhammadiyah dan Sarekat Islam (SI). Noer memisahkan kemunculan dan perkembangan modernisme Islam dari sejarah sosial dan intelektual Islam Indonesia. Ia gagal mengapresiasi kontribusi ulama dalam pembentukan diskursus Islam di Indonesia modern, dan melabelkan gerakan ulama semata-mata sebagai reaksi “Muslim tradisional” (*kaum tua*) terhadap suara-suara reformis dari “Muslim modernis” (*kaum muda*).¹²

Pertumbuhan pesantren, surau, dayah, tarekat sufi pada gilirannya membentuk otoritas keagamaan, dan menjadikan ulama memiliki fondasi institusionalnya sendiri dalam mendefinisikan Islam. Ulama tampil sebagai ahli tunggal Islam yang berkontribusi dalam praktek-praktek keagamaan, membina gerakan sosial keagamaan termasuk pendidikan Islam di wilayah-wilayah mereka masing-masing. Proses ini semakin meningkat ketika jaringan ulama dengan Timur Tengah semakin intensif, ditandai pembentukan komunitas Jawi di Makkah. Komunitas Jawi berkontribusi besar dalam membuat Makkah abad ke-19 menjadi “jantung kehidupan keagamaan di kepulauan Hindia Timur”¹³. Di masa itu Makkah muncul sebagai tujuan intelektual di mana ulama belajar Islam dan kemudian mentransmisikannya ke Nusantara. Sementara itu, pesantren yang mayoritas dipimpin ulama yang pernah belajar di Makkah berfungsi sebagai basis bagi transmisi Islam selanjutnya ke Umat Muslim di berbagai wilayah Nusantara.

Di masa-masa kolonialisme Belanda, kebijakan kolonial Belanda tentang Islam di Hindia juga berkontribusi dalam memperkuat terbentuknya ulama dan pesantrennya sebagai sebuah komunitas tersendiri. Kebijakan kolonial diarahkan untuk menciptakan elite agama baru yang tunduk dan dibesarkan dalam lingkaran kolonial yakni penghulu sebagaimana uraian di atas. Berbeda lagi peran ulama di masa itu yang sebagian di antara mereka terlibat dalam gerakan protes melawan kolonialisme. Mereka tidak memiliki pilihan kecuali memilih mengasingkan diri di wilayah-wilayah pedesaan, dan konsekuensinya berada di luar dominasi pemerintahan kolonial. Dalam situasi tersebut, sembari menikmati status mereka sebagai elite sosial di wilayah pedesaan, ulama mengalami proses konsolidasi menjadi komunitas yang berbeda. Pada akhirnya sebagaimana yang kita pahami, ulama dengan pesantrennya muncul ke permukaan sebagai apa yang disebut dengan komunitas santri, di mana ajaran-ajaran Islam dijalankan secara ketat.

¹²Ibid., 10-11.

¹³Michael Francis Laffan, *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia* (London: RoutledgeCurzon, 1921), 57-61.

Dalam perkembangan selanjutnya, ulama pesantren terus berkembang menjadi komunitas yang secara sadar mengidentifikasi diri mereka ke dalam sikap sosial dan bahasa agama yang berbeda dari penghulu, elite agama yang diangkat kolonial Belanda, priyayi atau aristokrat pribumi. Ulama yang tampil sebagai komunitas santri memiliki fondasi yang kuat, baik secara kultural maupun sosial, yang membuat mereka mampu merespon berbagai perubahan di pemerintahan Hindia Belanda, misalnya dengan pembentukan asosiasi gerakan sosial keagamaan. Selain merumuskan apa yang disebut tradisi Islam, ulama juga terlibat tampil dalam memodernisasi pusat-pusat pembelajaran Islam, yaitu pesantren, yang menjadi salah satu pilar dasar keberadaan mereka.

Partisipasi ulama di pemerintahan Hindia Belanda muncul dalam pembentukan asosiasi ulama pada tahun 1926, Nadhlatul Ulama (NU). Dengan NU, pendefinisian Islam oleh ulama bagi Muslim Indonesia menjadi semakin intensif dan pembentukan otoritas mereka juga semakin meningkat. Modal kultural dan sosial ternyata mampu membuat ulama mempertahankan posisi penting mereka dalam masyarakat dan politik di negeri ini, membentuk otoritas untuk menjaga peran mereka dalam masyarakat Indonesia hingga masa modern sekarang ini.¹⁴

Perkembangan Gerakan Sosial-Keagamaan dan Pendidikan Islam Masa Kolonialisme

Pada masa kolonialisme Belanda yang dimulai sejak seperempat pertama abad ke-17, mereka awalnya tidak turut campur terhadap sistem pendidikan Islam di kalangan masyarakat Muslim Nusantara. Namun pasca perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Pebruari 1755, setahap demi setahap pemerintah kolonial mulai memperlihatkan tekanan dan serangan terutama terhadap kekuasaan kerajaan Mataram. Tampaknya pemerintah kolonial Belanda tidak jauh berbeda dengan kolonial Inggris yang menguasai Jawa sejak 1811 hingga 1816. Belanda berupaya keras untuk menekan pengaruh Muslim di Jawa dengan menggunakan kekuatan

¹⁴Secara Institusional Nahdlatul Ulama (NU) yang pada masa berdirinya dikelompokkan sebagai gerakan yang mengakomodasi orientasi idiologis Kaum Tua, sekarang banyak mengalami perubahan menyangkut wawasan para anggotanya. Diadopsinya lembaga-lembaga sosial keagamaan modern dalam program gerakan seperti rumah sakit, sekolahan, yang dahulu ditolakinya, merupakan bukti adanya perubahan yang dimaksudkan. Demikian juga sikapnya terhadap Barat, yang pada awal abad kedua puluh diekspresikan dalam politik non-kooperatif dan semangat anti budaya Barat, sekarang tidak lagi demikian. Demikian juga sebaliknya, banyak pendukung dari kelompok Kaum Muda sekarang tidak lagi memiliki karakteristik yang dulu menjadi identitas komodern mereka. Banyak dari mereka sekarang ini yang menjadi tertutup, sulit menerima perubahan, dan cenderung menerima status-quo, dan arena itu menjadi konservatif-tradisionalis. Achmad Jainuri, *Orientasi Ideologi Gerakan Islam: Konservatisme, Fundamentalisme, Sekularisme, dan Modernisme* (Surabaya: Lembaga Pengkajian dan Masyarakat (LPAM), 2004), 129-130.

mereka di luar Yogyakarta dan Surakarta khususnya diindikasikan oleh gubernur Hindia Timur Sir Thomas Stamford Rafles.¹⁵

Sebagaimana dijelaskan di atas, pemerintah kolonial Belanda membentuk penghulu sebagai petugas keagamaan yang diberi wewenang oleh Belanda. Para penghulu ini bertugas mengurus keagamaan sehari-hari termasuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, sadaqah dan wakaf. Meskipun pada akhirnya institusi keagamaan ini hapus karena kecurigaan pemerintah kolonial terhadap kaum Muslimin yang ditenggarai dapat mengganggu stabilitas pemerintahan kolonial. Suasana dan aturan politik yang diciptakan oleh Belanda, akhirnya turut menghambat perkembangan institusi-intitusi Muslim, khususnya pesantren-pesantren.¹⁶

Kenyataan ini membentuk sebuah “stigma” bahwa pemerintahan kolonial (Belanda dan Inggris) tidak mendukung kemajuan kehidupan sosio-religius masyarakat Muslim Jawa, dan tidak memberikan kebebasan kepada mereka untuk melaksanakan praktek-praktek keagamaan sebagaimana yang telah diberikan oleh kesultanan Mataram. Di sini pada akhirnya semakin banyak tekanan dan operasi yang dilakukan oleh kaum kolonial, maka semakin positif respons kaum Muslim dengan memandang agama mereka sebagai pengerak utama dalam upaya membebaskan diri dari penindasan kolonial.¹⁷

Di Jawa misalnya, Belanda merusak dan menghancurkan komponen kehidupan perdagangan orang Jawa dan politik umat Islam.¹⁸ Belanda juga melakukan penekanan dan bertindak represif terhadap kegiatan keagamaan umat Islam. Upacara-upacara ritual yang terbuka dilarang, naik haji dibatasi dan para haji diawasi gerak-geriknya. Penekanan dan pengawasan ketat itu menimbulkan perlawanan dari umat Islam. Perang Diponegoro adalah contoh perlawanan besar dengan melibatkan sekitar 88 kyai, 11 syekh, 18 pegawai keagamaan, 15 guru agama, 3 nyai dan sejumlah santri.¹⁹ Demikian juga halnya dengan perang Paderi, Perang Aceh, dan lain-lain.

Setelah itu pemerintah kolonial Belanda mulai agak mengurangi penekanan, pengawasan atau pembatasan terhadap aktivitas dan pengamalan keagamaan umat Islam. Mereka, misalnya memberi sedikit kebebasan terhadap orang-orang Islam yang berkeinginan naik haji ke

¹⁵Abdurrahman Mas’ud, *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 69-71.

¹⁶Ibid.

¹⁷Ibid.

¹⁸Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). 1, 150.

¹⁹P.B.R Carey, “Satria dan Pandita”, Some Note on Relationship Between Dipanagara’s Keraton and Religious Supporters During the Java War (1825-1830)” dalam T Ibrahim Alfian, et.al., (ed), *Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis* (Yogyakarta: UGM Press, 1988), 276.

Makkah. Akibatnya, umat Islam pun berbondong-bondong naik haji dengan jumlah yang selalu meningkat. Mereka selain menunaikan ibadah haji juga mempelajari ilmu-ilmu agama secara serius dan tekun. Sekembalinya dari Tanah Suci, mereka mengamalkan dan mengajarkan ilmu, sehingga jumlah guru agama dan institusi pendidikan Islam meningkat dratis. Berdasarkan data statistik yang ada di pemerintahan tahun 1885, terdapat sekitar 14.929 lembaga pendidikan Islam tradisional di seluruh Jawa dan Madura.²⁰

Sekembali belajar dari Makkah, mereka pun para ulama melakukan perubahan-perubahan awal di tanah kelahiran mereka. Salah satu yang mendapat perhatian serius adalah perbaikan pada bidang pendidikan Islam tradisional yang dianggap telah usang dan ketinggalan zaman. Pada mulanya sebagian mereka mengajar agama di sekolah-sekolah milik pemerintah Hindia Belanda, tetapi pengajaran mereka itu tidak dihitung sebagai bagian kurikulum. Mereka hanya diperkenankan untuk mengajar murid-murid sekolah pada sore hari. Tidak puas dengan cara demikian, maka mereka memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan pembaharuan dalam bidang pendidikan Islam yaitu dengan cara mendirikan sekolah-sekolah dengan model Barat, sebagaimana juga sudah mulai berkembang dan mereka saksikan di Timur Tengah. Proses belajar mengajar tidak lagi bertempat di surau-surau dengan duduk melingkar, tetapi di kelas-kelas (sistem klasikal) dengan menggunakan bangku. Kurikulum yang diajarkan pun tidak hanya berkuat pada bidang studi agama tetapi juga diajarkan materi pengetahuan umum, termasuk bahasa Inggris dan Belanda menjadi bagian integral dari kurikulum tersebut.²¹

Pembaharuan lembaga pendidikan Islam diprakarsai oleh Ulama secara individual, didukung oleh masyarakat, dan kemudian berkembang menjadi organisasi gerakan sosial keagamaan Islam. Berikut perkembangan organisasi-organisasi sosial keagamaan Islam di masa kolonialisme.

1. Jamiat Khair, pendiri Sayid Muhammad al-Fachur bin Abdurrahman al-Masyhur dkk.²² berdiri 17 Juli 1905 di Jakarta. Jamiat Khair mendirikan Sekolah Dasar (SD).
2. Al-Irsyad, pendiri Syaikh Ahmad Soarkarti, didirikan tahun 1913. Lembaga ini lahir dari perpecahan Jamiat Khair dan mendirikan Sekolah Dasar (SD).

²⁰Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982), 16.

²¹Badri Yatim, dkk. *Sejarah Perkembangan Madrasah* (Jakarta: Depag RI, 2000), 125.

²²Mereka adalah Sayid Muhammad al-Fachur bin Abdurrahman al-Masyhur, Sayid Muhammad bin Abdullah bin Sjihab, Sayid Idrus bin Ahmad bin Sjihab, dan Sayid Sjehan bin Sjihab.

3. Persyarikatan Ulama, pendiri Haji Abdul Halim, sedangkan tahun berdirinya 1911 di Majalengka Jawa Barat. Semula mendirikan Organisasi ekonomi Hayatul Qulub yang bentuk lembaganya berupa madrasah.
4. Muhammadiyah, pendiri K.H. Ahmad Dahlan, tahun 18 Nopember 1912. Mendirikan berbagai institusi modern.
5. Persatuan Islam (PERSIS), pendiri Zamzam dan Muhammad Yunus, tahun 12 September 1923 di Bandung. Mendirikan Madrasah, Sekolah, TK, HIS, Sekolah MULO, dan Sekolah Guru.
6. Nadhlatul Ulama, pendiri K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. A. Wahab Hasbullah pada 31 Januari 1926. NU mendirikan berbagai institusi tradisional dan modern.
7. Persatuan Guru Agama Islam (PGAI), pendiri Zainuddin Labai, tahun 1919 di Minangkabau. Mendirikan sekolah modern Normal Islam.
8. Sarekat Islam (organisasi dagang khususnya batik Solo), pendiri Haji Samanhudi, tahun 1911 di Solo. Lahir sebagai usaha peningkatan kompetisi dalam perdagangan batik, khususnya dari pedagang China; dan penindasan oleh bangsawan Solo. Selanjutnya H.O.S. Tjokroaminoto (1882-1934) tokoh dari Surabaya mengubahnya menjadi gerakan politik dengan bernama Sarekat Islam (SI).
9. Hadji Organisasi Hindia (HOH), pendiri Mas Mansur, tahun 1926 di Surabaya. Tujuan organisasi ini adalah memberikan pencerahan kepada para calon jama'ah haji Hindia Belanda²³.
10. Majelis Pemuda Dunia (WAY-World Assembly of Youth), pendiri Lukman Harun, tahun 1960 Jakarta. Majelis Pemuda Dunia merupakan organisasi Islam internasional yang membuat dia sering berpergian ke berbagai negeri. Reputasi internasionalnya mulai menyebar, khususnya karena dia mengetuai Komite Solidaritas Islam (KSI). Melalui organisasi ini, dia menjalin kontak dengan pemimpin-pemimpin Muslim lain, termasuk Yasser Arafat dan Muamar Qadafi. Lukman Harun (1934-1999) dan Djarnawi Hadikusumo (wafat 1993), adalah oposisi pemerintahan Soeharto. Keduanya adalah pendiri sekaligus pemimpin pertama Majelis Pemuda Dunia.

Gerakan perkembangan organisasi-organisasi sosial keagamaan Islam di masa kolonialisme tersebut di atas merupakan luapan menemukan identitas yang bersifat legalisme dan formalisme Islam di Indonesia. Semua itu tidak muncul begitu saja dari ruang kosong. Kiprah Islam selain bergerak di ruang sosial keagamaan pendidikan Islam juga bersinggungan langsung dengan politik di negara ini. Bila kiprah Islam dalam gerakan politik dalam rangka menemukan sebuah format baru legalitas atau

²³Lihat lebih detail dalam Darul Aqsa, *Kiai Haji Mas Mansur, 1896-1946: Perjuangan dan Pemikiran* (Surabaya: Erlangga, 2005).

formalitas Islam-negara,²⁴ maka gerakan sosial keagamaan pendidikan Islam menjadi lahan penyemaian nilai-nilai atau ideologi keislaman.²⁵

Lahirnya gerakan sosial keagamaan dipengaruhi berbagai pergolakan dan perlawanan atas *sense of superioritas* kolonial terhadap rakyat pribumi. Untuk sebagian besar, berbagai gerakan, pemikiran dan aksi itu didorong oleh perjumpaan-perjumpaan yang sifatnya negatif dengan Barat, terutama sekali kolonialisme Belanda. Proses panjang dan amat menentukan dari kontrol kolonial ini, tidak diragukan lagi, mempunyai pengaruh menyeluruh yang sangat merugikan. Bagi sebagian besar komunitas Muslim, pengaruh itu terutama tampak nyata dengan hilangnya berbagai kesempatan-kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kehidupan ekonomi, mengelola institusi-institusi pendidikan untuk pemenuhan pendidikan bagi rakyat Indonesia dan termasuk menyalurkan aspirasi-aspirasi di panggung politik.²⁶

Kolonialisme juga mempercepat perkembangan institusi-institusi Muslim di Jawa, terutama pesatnya pertumbuhan pesantren di abad ke-19. Penderitaan orang-orang Jawa akibat kolonialisme menimbulkan rasa kebencian masyarakat Jawa, khususnya umat Muslim. Tidak hanya membenci kolonial, mereka juga membenci agama dan budaya yang dianut mereka. Kebencian terhadap agama dan budaya yang dianut kolonial membuat masyarakat Muslim memberikan perhatian pada Islam sebagai identitas kelompok yang ditindas orang Barat. Kontak masyarakat Muslim Jawa dengan Tanah suci sebagaimana dipaparkan di atas, turut berkontribusi memberikan dorongan angin segar kepada mereka untuk mendalami Islam. Islam kemudian dijadikan sebagai identitas kultural, sehingga orang-orang Islam di Jawa semakin meningkat. Pertentangan masyarakat Muslim dengan Kaum Kolonial memberi keuntungan tersendiri berupa militanisme terhadap Islam dan semangat mempelajari

²⁴Bahtiar Effendi mengungkapkan upaya menemukan format baru Islam politik di Indonesia adalah dalam rangka memperluas dan meragamkan mekanisme politik umat Muslim yang mencakup berbagai organisasi non-pemerintah seperti NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Lebih dari itu, mereka juga ikut bermain dalam partai politik semisal Golkar atau partai berkuasa lainnya. Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara*, 334.

²⁵Menurut Arief Subhan, ternyata masih terdapat sebuah persepsi di kalangan sarjana terutama kaum Islamis yang memandang madrasah sebagai lembaga monolitik. Misalnya, madrasah Islam di Pakistan dipersepsikan sebagai lembaga pendidikan yang sama dengan madrasah di Thailand dan Indonesia. Persepsi demikian menyebabkan generalisasi yang menyesatkan, bila di kaitkan dengan opini bahwa madrasah sebagai tempat penyemaian nilai-nilai radikalisme dan terorisme. Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), halaman cover belakang.

²⁶Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara*, 332.

Islam lebih mendalam. Semangat ini menjadi alasan utama semakin menjamurnya lembaga-lembaga pendidikan Islam.²⁷

Tradisi institusi-institusi Muslim memiliki rangkaian historis dan ideologis. Aktivitas intelektual dan akademik merupakan ciri-ciri yang paling menonjol dari jaringan para pelajar ini. Ketika pemerintah kolonial memperketat kontrol mereka atas pelajaran-pelajaran di institusi Muslim Jawa abad-19, para pelajar atau santri terkemuka berpetualang jauh hingga ke pusat dunia Islam, selain menunaikan rukun Islam yang ke-5, mereka juga memperdalam ilmu-ilmu Islam, bahkan selain belajar, sebagian mereka juga mengajar di sana.²⁸ Diantara para pelajar Islam yang berasal dari nusantara ini, mereka pun menjadi pengajar di sana. Mereka menjadi ulama bertaraf internasional dari Indonesia. Mereka Adalah (1) Syaikh Nawawi al-Bantani Jawa Barat (w. 1897), (2) Syaikh Ahmad Khatib al-Minankabawi Sumatera Barat (w. 1916), (3) Syaikh Mahfuzh al-Turmusi Pacitan Jawa Timur (w. 1920), (4) Syaikh Ihsan al-Jamfasi al-Kadiri Jawa Timur (w. 1952), dan (5) Syaikh Yasin al-Fadani Sumatera Barat (w. 1990). Mereka dapat disebut sebagai ulama internasional karena tinggal di Tanah Suci, mengajar, wafat, dan dimakamkan di sana, kecuali Syaikh Ihsan al-Jamfasi al-Kadiri. Mereka juga menulis dalam Bahasa Arab dan Karyanya diterbitkan oleh penerbit Timur Tengah, misalnya *al-Tafsīr al-munīr li ma'ālim al-tanzīl*, *Sirāj al-ṭālibīn* dan lain-lain.²⁹

Di masa kolonial selain terbentuk jaringan intelektual, jaringan haji, juga terjalin keanggotaan tarekat yang merupakan afiliasi paling solid. Keanggotaan tarekat merupakan afiliasi paling solid dan paling krusial berdasarkan fakta bahwa jaringan itu diperkokoh dengan kesetiaan para pengikutnya dan perjuangan untuk meningkatkan kualitas kesalehan mereka di bawah seorang guru sufi. Keanggotaan tarekat yang anggotanya tersebar di berbagai wilayah nusantara ini turut memainkan peran dalam pembentukan gerakan sosial keagamaan dan pelembagaan pendidikan Islam. Keanggotaan tarekat juga memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan sosio-religius, khususnya di kalangan rakyat jelata

²⁷Hanun Asroah, *Pelembagaan Pesantren: Melacak Asal Usul dan Perkembangan Pesantren di Jawa*, dalam *Akademika Jurnal Studi Islam* Volume 18, Nomor 2, Maret, ISSN: 1410-7457, Akreditasi Dirjen Dikti Diknas Nomor: 34/ DIKTI/ Kep/ 2003 (Surabaya: PPs IAIN, 2006), 59.

²⁸Para pelajar yang berjumlah sangat banyak, mereka memiliki hubungan dengan para gurunya. Hubungan yang menjadi ikatan sepanjang hidup, tidak dapat dipisahkan oleh waktu dan tempat. Selain itu terdapat suatu tendensi di kalangan pemimpin pesantren untuk mempererat tali ikatan antara guru-santri dengan jalan mengadopsi santri sebagai menantu. Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren*, 89.

²⁹Muhammad Sholahudin, *5 Ulama Internasional dari Pesantren* (Kediri: Nous Pustaka Utama, 2014).

yang membutuhkan jaringan solid bagi perlindungan fisik maupun spiritual.³⁰

Berkaitan dengan pengembangan pendidikan Islam masa kolonialisme melihat juga adanya kenyataan politik di Tanah Air pada zaman pemerintahan Hindia Belanda yang mengeluarkan kebijakan pengembangan pendidikan persekolahan yang dianggap pemerintah Belanda lebih modern daripada madrasah yang pada waktu itu kurang menarik minat dari sudut penyajian kurikulum, pengelolaan lembaga maupun sarana prasarannya. Madrasah dalam batas-batas tertentu merupakan lembaga persekolahan yang diberi muatan agama. Ini tentu cukup beralasan mengingat Pemerintah Hindia Belanda atas perintah Gubernur Jenderal Van Heutsz mulai menyelenggarakan sistem pendidikan bagi masyarakat yang lebih luas dalam wujud sekolah-sekolah desa sehingga pemerintah kolonial mengembangkan dan memanfaatkan tradisi pendidikan rakyat yang telah mapan yaitu pendidikan Islam madrasah.³¹

Sistem persekolahan yang pemerintahan Hindia Belanda untuk rakyat Indonesia pada mulanya terbatas untuk kalangan bangsawan. Namun sesungguhnya pendirian sekolah-sekolah ini merupakan langkah politik kolonial Hindia Belanda dalam rangka menyediakan pendidikan bagi putera-puteri keturunan Belanda di Indonesia. Selain itu gerakan pencerahan di Barat juga turut mempengaruhi kebijakan mereka dan menjadi alasan dikembangkannya pendidikan bagi rakyat. Mulai tahap ini, rakyat yang sebelumnya hanya memiliki pilihan untuk belajar di lembaga-lembaga pendidikan tradisional, mulai mendapat kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah milik pemerintah Hindia Belanda.³²

Berikut ini pemaparan tentang lembaga-lembaga pendidikan baik milik pemerintah Hindia Belanda maupun madrasah yang didirikan oleh para ulama pada masa tersebut.

1. Sekolah Desa Kelas Satu atau *Hollands Inlandsche School (HIS)* dan Sekolah Desa Kelas dua (*Standart School*) milik Pemerintah Hindia Belanda, tahun berdiri 1607 di Ambon. Pada tahun 1645 mencapai 33 sekolah. Tujuan sebagai penyebaran agama Kristen Protestan. Di Jawa terutama di basis VOC yaitu Jakarta, Cirebon, dan Banten sekolah baru didirikan pada tahun 1617, kemudian menyebar ke kota-kota lain. Kurikulum di sekolah ini adalah Membaca, Menulis dan Berhitung.
2. Sekolah lanjutan *Meer Unigebreid Lager Onderwijs (MULO)* milik Pemerintah Hindia Belanda, berdiri pada tahun 1914. Mulo semula

³⁰Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren*, 88.

³¹Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1999), 92-93.

³²*Ibid.*, 94.

- merupakan lembaga kursus yang selanjutnya berevolusi menjadi Sekolah Lanjutan Pertama (SMP).
3. Sekolah lanjutan tingkat atas AMS milik Pemerintah Hindia Belanda, tahun berdiri 1919. AMS kelas A didirikan di Bandung dan Surakarta. Jurusan sekolah ini adalah Ilmu Pengetahuan Kebudayaan. Sedangkan AMS kelas B didirikan di Yogyakarta dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Kealaman.
 4. Sekolah Islam *Mulo met de Qur'an* yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta.
 5. *Adabiyah School* yang berubah menjadi HIS Adabiyah pada tahun 1915 di Padang Sumatera Barat, berdiri tahun 1909. Kurikulum yang diajarkan mengkombinasikan antara pelajaran agama dan umum dengan menggunakan metode dan proses belajar mengajar yang mengadopsi sekolah Belanda. Didirikan oleh Haji Abdullah Ahmad (1878-1933).
 6. Madras School di Batu Sangkar Sumatera Barat, berdiri tahun 1910. Didirikan oleh Syekh Muhammad Umar Thalib.
 7. Adabiyah School yang berubah menjadi HIS Adabiyah Padang Panjang Sumatera Barat. Kurikulumnya berupa mata pelajaran Islam yang referensinya berasal dari Mesir. Madrasah ini didirikan oleh Zainuddin Labai al-Yunusi (1890-1924).
 8. Madrasah Diniyah Puteri Padang Panjang Sumatera Barat, berdiri tahun 1923. Didirikan oleh Rahmah al-Yunusi saudara perempuan Zainuddin Labai. Madrasah ini merupakan madrasah pertama khusus bagi perempuan di Indonesia.
 9. Madrasah Sumatera Thawalib di Minangkabau yang berdiri pada tahun 1904. Madrasah ini merupakan transformasi Surau Jembatan Besi dan bergabungnya Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Karim Amrullah.
 10. Lembaga pendidikan guru "Normal Islam" atau Kuliah Mu'allimin al-Islamiyah (KMI), berdiri pada tahun 1918. Pendiri Institusi ini adalah Abdullah Ahmad dan para ulama Minangkabau. Tujuannya untuk mendorong kemajuan pendidikan Islam. Istilah KMI dikemudian hari diadopsi oleh Pondok Pesantren Gotor Ponorogo dan cabang-cabangnya. Organisasi Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) yang lahir dari "Normal Islam" juga berupaya melakukan penekanan kekuatan politik kepada pemerintah Hindia Belanda.³³

³³Organisasi pendidikan tersebut memiliki kekuatan politik untuk menekan pemerintah Belanda, terutama berkaitan dengan kebijakan di bidang pendidikan yang dianggap tidak adil. Reaksi keras pun muncul dari pemerintah Hindia Belanda sehingga Belanda memperketat perkembangan pendidikan Islam. Setelah muncul kebijakan yang dikenal dengan Ordonansi Guru 1925 pada akhirnya menetapkan lembaga-lembaga pendidikan Islam sebagai sekolah liar (*wilde school*). Kampanye anti "Ordonansi Guru" melalui

Menjelang abad ke-20, beberapa sekolah Islam modern didirikan. Di Padang, Abdullah Ahmad mendirikan Adabiyah, sekolah Islam yang didirikan dengan sistem modern. Ketika dimulai pada 1909, kira-kira 20 murid masuk sekolah itu, sebagian besar anak-anak pedagang lokal. Adabiyah menganut sistem sekolah dasar Belanda (HIS, Hollands Inlandse School), kecuali dalam hal mata pelajaran agama seperti Alquran dan Bahasa Arab yang juga diajarkan. Enam tahun setelah pendiriannya, sekolah itu menerima subsidi dari pemerintah, hal yang membuatnya tidak lagi sepenuhnya independen dalam mengembangkan kurikulumnya. Pada umumnya, tidak ada yang istimewa tentang sekolah itu kecuali fakta bahwa ia adalah sekolah pertama yang mendobrak sistem tradisional di Minangkabau. Setelah Adabiyah, ada Surau Jembatan Besi, sekolah yang tumbuh dari surau tradisional. Bangunan fisik sekolah itu sederhana. Seperti diceritakan Hamka, walaupun ia menganut sistem kelas modern, murid-murid masih duduk di lantai. Namun, dalam hal kurikulum, ia lebih kaya daripada Adabiyah dan lebih independen dalam mengembangkan mata pelajaran agama dengan semangat Kaum Muda.³⁴

Di antara sekolah-sekolah paling awal, Sumatra Thawalib mungkin yang paling modern, baik dalam hal struktur fisik maupun isi pendidikan. Dibangun oleh guru-guru Surau Jembatan Besi, Thawalib menjadi sekolah pertama yang menerapkan sistem modern secara penuh: menganut sistem kelas, memakai meja sekolah, menerapkan kurikulum terorganisasi, dan mengharuskan murid membayar iuran sekolah. Tidak seperti Adabiyah, sekolah itu sepenuhnya independen dari intervensi pemerintah, terutama karena ia bisa menghasilkan uang dan mendanai diri sendiri. Karena secara finansial berotonomi dan secara ekonomis berhasil, Thawalib mengembangkan kurikulumnya sendiri menurut cita-cita Kaum Muda. Ia mengimpor beberapa buku dari Mesir dan mengajarkan karya-karya beberapa modernis Muslim. Karya Muhammad 'Abduh, Tafsir al-Manar, termasuk dalam daftar. Untuk memperluas pengaruhnya, para pendiri sekolah itu juga mendirikan beberapa cabang di kota-kota di luar Padang Panjang.³⁵

Namun sesungguhnya kolonialisme Pemerintah Hindia Belanda belum berakhir. Kedatangan Jepang pada 10 Januari 1942 menandai akhir kolonialisme Belanda. Namun, itu tidak berarti bahwa kolonialisme telah berakhir. Jepang datang di negeri ini bukan untuk membebaskan, melainkan, seperti Belanda, ingin menjadikannya koloni. Indonesia pada akhirnya terbagi ke dalam dua faksi: yang bersikap kooperatif dan mereka

organisasi-organisasi sosial keagamaan Islam termasuk Muhammadiyah terbukti efektif menunda pelaksanaan ordonansi guru tersebut. Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20*, 110.

³⁴Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia*, 48.

³⁵Ibid.

yang tidak kooperatif dalam upaya mencapai kemerdekaan. Pemimpin Muslim pada masa itu lebih siap menyokong kooperasi dengan Jepang, terutama karena rezim kolonial baru itu menawarkan mereka sejumlah besar konsesi, seperti pendirian Shumubu, kantor urusan agama, pada 1942, penciptaan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada 1943, dan pembentukan organisasi paramiliter Hizbullah pada 1944. Selain itu, Jepang juga menjalankan reformasi agama dan pendidikan dengan merestrukturisasi administrasi Islam mengenai wakaf, zakat, dan urusan pribadi (misalnya, perkawinan), serta dengan mendorong pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam (pesantren dan madrasah).³⁶

Menjelang tahun 1945, kekuatan militer Jepang mulai ditenggelamkan sekutu. Lembaga-lembaga paramiliter yang mereka ciptakan, termasuk Hizbullah, tidak banyak menolong. Bahkan, sebagian dari mereka melakukan desersi dan menyerang kepentingan Jepang. Melihat situasi yang memburuk, otoritas Jepang mulai mengambil langkah serius ke arah kemerdekaan Indonesia. Langkah pertama adalah membubarkan organisasi-organisasi paramiliter dan kemudian mendirikan lembaga administratif untuk kemerdekaan. Pada Maret 1945, mereka mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).³⁷

Pembentukan Kementerian Agama segera menimbulkan kontroversi di antara berbagai pihak di dalam masyarakat Indonesia. Kaum Muslim umumnya memandang bahwa keberadaan Kementerian Agama merupakan suatu keharusan sejarah. Ia merupakan kelanjutan dari instansi yang bernama Shumubu (Kantor Urusan Agama) pada masa pendudukan Jepang, yang mengambil preseden dan Het Kantoor voor Inlandsche Zaken (Kantor untuk Urusan Pribumi) pada masa kolonial Belanda. Bahkan sebagian Muslim melacak eksistensi Kementerian Agama ini lebih jauh lagi, ke masa kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan, yang sebagiannya memang memiliki struktur dan fungsionaris yang menangani urusan-urusan keagamaan.³⁸

Akan tetapi, beberapa pengamat berargumen bahwa pembentukan Kementerian Agama merupakan bagian dari strategi Sjahrir untuk mendapatkan dukungan bagi kabinetnya dari kaum Muslim. Rosihan Anwar, tokoh sosialis Muslim, misalnya menyatakan pandangan ini berdasarkan pada pengakuan Sjahrir bahwa kaum Muslim merupakan mayoritas penduduk Indonesia, yang secara alamiah wajar memerlukan kementerian khusus untuk mengelola masalah-masalah keagamaan mereka. Sementara itu, pada pihak lain, sejumlah pemimpin Indonesia,

³⁶Ibid., 77.

³⁷Ibid.

³⁸Toto Suharto, *Pendidikan Berbasis Masyarakat Organik: Pengalaman Pesantren Persatuan Islam* (Surakarta: Fatama Press, 2013), 83-84.

terutama dari kalangan non-Muslim dan nasionalis, memandang Kementerian Agama merupakan konsesi yang terlalu besar dari republik yang baru berdiri kepada kaum Muslim. Mereka khawatir kementerian ini akan didominasi pejabat-pejabat Muslim, dan dengan demikian akan lebih memprioritaskan urusan-urusan Islam daripada urusan agama-agama lainnya yang ada di Indonesia. Lebih jauh lagi, di antara mereka ada yang menuduh bahwa Kementerian Agama merupakan langkah pertama kaum Muslim untuk mewujudkan “negara Islam” di Indonesia, setelah mereka gagal dalam sidang BPUPKI untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara.³⁹

Bentuk tipikal oposisi kalangan non-Muslim terhadap eksistensi Kementerian Agama dapat terlihat dari pandangan J.W.M. Bakker, pemimpin Katolik yang bermukim di Indonesia. Bakker menyatakan bahwa sejak semula Kementerian Agama merupakan “kubu Islam dan batu loncatan untuk pembentukan sebuah negara Islam”. Tuduhan ini tentu saja dijawab oleh para pemimpin Islam. Wahid Hasyim, pemimpin NU yang kemudian menjabat Menteri Agama pada 1950-1952 menyatakan, adalah pantas bagi Kementerian Agama untuk memberikan perhatian lebih besar kepada masalah-masalah Islam, karena jumlah penduduk Muslim jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kaum non-Muslim. Karena itu, tugas-tugas untuk pengelolaan masalah-masalah Islam dan kaum Muslim tidak sama besarnya dengan penanganan masalah-masalah kaum Muslimin. Demikianlah kelahiran kementerian ini senantiasa menjadi representasi kaum Muslim di dalam memperjuangkan aspirasi Islam di Indonesia, termasuk dalam masalah penyelenggaraan pendidikan Islam.⁴⁰

Gerakan Pembaharuan Lembaga Sosial Keagamaan dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia: Kasus Muhammadiyah, NU, dan Persatuan Islam (Persis)

Muhammadiyah dan pengikutnya sebagian besar adalah penduduk kota dari kalangan pengusaha menengah, pegawai sipil dan tenaga profesional. Anak-anak mereka mengenakan pakaian ala barat dan memanggil guru-guru mereka dengan panggilan ustadz, sebutan bahasa Arab untuk guru. Pengikut kedua organisasi ini (Muhammadiyah dan NU) semakin bertambah besar. Ulama-ulama NU mengurus banyak pesantren, sedangkan pengikut Muhammadiyah mendirikan jaringan sekolah mulai dari tingkat TK, Akademi hingga Perguruan Tinggi. Juga mendirikan tempat-tempat penampungan anak yatim dan jompo serta Rumah Sakit. NU lebih banyak berkiprah dalam masalah-masalah tradisional sedangkan pengikut Muhammadiyah lebih banyak melakukan gerakan pembaruan.

³⁹Ibid.

⁴⁰Ibid.

Perbedaan antara kedua organisasi ini sudah nampak sejak awal berdirinya. Dan perkembangan keadaan belakangan ini menjadikan perbedaan-perbedaan di antara kedua organisasi, menyusup pula di kalangan sebagian perwira militer.⁴¹

Pada awal tahun-tahun berdirinya Muhammadiyah, organisasi ini sangat terpengaruh oleh gagasan reformasi sosial secara total. Barangkali hal ini akibat dari pengaruh misionaris yang membuat menonjol badan-badan pendidikan Kristen. Para anggota Muhammadiyah berpendapat, bahwa sistem pendidikan misionaris dapat menjadi perantara untuk membangun kemampuan khusus kalangan terpelajar, guru, dan kaum pemikir. Jumlah anggota Muhammadiyah sampai sekarang (tahun 1989) kurang lebih berjumlah dua puluh juta orang dengan membawahi tidak kurang dari 2000 sekolah, 16 Universitas, 21 Akademi, 9 rumah sakit umum (PKU), ratusan tempat penampungan anak yatim, puluhan ribu masjid. Adapun 'Aisyah, adalah bagian perempuan Muhammadiyah, terdiri dari para putri dan ibu-ibu yang tergabung di dalam organisasi pendidikannya.⁴²

Sistem pendidikan di dalam organisasi Muhammadiyah telah mencapai tingkatan yang kokoh dan mapan sehingga dapat menyaingi sistem pendidikan sekolah negeri. Dalam kenyataannya tidak terdapat perbedaan apapun mengenai sistem pengajaran dan pendidikan antara kedua lembaga tersebut (Muhammadiyah dan Pemerintah). Tetapi Muhammadiyah memiliki sistem birokrasi sendiri. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya memelihara sekolah-sekolah, universitas dan rumah sakit-rumah sakit, termasuk juga memelihara ide pembaharuan yang menjadi ciri khasnya sejak semula. Sebab pada tahun-tahun terakhir ini muncul anggapan dari para cendekiawan Muslim, bahwa sistem yang ditempuh oleh pemerintah dalam pengajaran yang mereka terapkan di sekolah, ternyata merugikan upaya memelihara kepribadian Islam.⁴³

Adapun sekolah-sekolah NU yang berkonsentrasi pada bidang pendidikan agama, yang dewasa ini sudah jarang dilakukan orang, sebagian besar sudah menjadi sekolah pemerintah atau hampir menjadi bagian dari sistem pengajaran di sekolah-sekolah negeri. Umumnya pesantren-pesantren ini berbasis di lingkungan masyarakat agraris, kantor-kantor modern dan organisasi-organisasi sosial. Para Kiai pada umumnya merasa bangga dapat melakukan usaha pembinaan manusia seutuhnya, berbeda dari sekolah-sekolah negeri yang hanya bertujuan mencetak pegawai negeri. Sementara kelompok abangan berpandangan bahwa

⁴¹ Al-Chaidar, *Pemetaan Kelompok Islam Radikal di Indonesia dan Islam Fundamentalis di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2007), 5-6.

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

pesantren tidak lebih dari suatu tatanan yang sudah ketinggalan zaman, dan tidak sesuai dengan realitas kehidupan modern.⁴⁴

Lain lagi pandangan dari para Kiai, mereka menilai guru-guru di sekolah Muhammadiyah sebagai orang-orang yang berwawasan sempit, sebab mereka tidak memiliki kepedulian sedikitpun terhadap kepentingan kehidupan di pedesaan. Masalah industri lokal atau pengaruh konsumerisme Barat di pedesaan-pedesaan yang sederhana tidaklah dapat diselesaikan hanya dengan mengajak kembali kepada Alquran dan Hadis. Demikian pula dengan para guru-gurunya yang terikat dengan modernisme. Oleh karena itu, upaya mengajak melakukan pembenahan berfikir yang seringkali didengungkan, tidak lebih dari sekedar propaganda.⁴⁵

Seperti telah kami katakan bahwa Muhammadiyah tidak hendak menyimpang dari metode pendidikan sosialnya, dan tidak pula terlibat dalam aktivitas politik, kecuali hanya beberapa tahun. Berbeda dengan NU yang memproklamirkandiri sebagai partai politik pada tahun 1953, dan berkecimpung dalam kegiatan kepartaian hingga tahun 1984. NU melakukan peran utama bersama pemerintah yang berkuasa, ikut berperan juga dalam pemerintahan Soekarno di bawah demokrasi terpimpinnya, sebagai unsur agama dalam Nasakom yang mencakup partai-partai Nasionalis, Agama dan Komunis. Pada tahun-tahun terakhir ini, NU mengalami sedikit kesulitan dengan pemerintahan militer Soeharto. Tujuan pokok dari NU adalah tetap *survive*, termasuk juga keberlangsungan pesantren-pesantrennya, dan seluruh anggota NU memperoleh perlindungan keamanan. Pada tahun 1974, untuk alasan-alasan yang akan kami sebutkan kemudian, menjadi jelaslah bahwa hidup matinya NU hanya bisa dipertahankan dengan menjadikan dirinya semata-mata sebagai lembaga pendidikan dan sosial, serta secara total menarik diri dari aktivitas partai politik (kembali ke khittah 1926). Sekalipun kedua organisasi ini menggunakan cara-cara berbeda sejak berdirinya, namun perbedaan tersebut pada tahun-tahun terakhir ini kian menipis. Kini NU tampil sebagai kelompok konservatif, sedangkan Muhammadiyah tampil sebagai reformis di Indonesia. Kedua organisasi ini sekarang merupakan organisasi Islam yang berpengaruh besar di Indonesia.⁴⁶

Dalam pergumulan modernisasi dan identitas lembaga pendidikan Islam Indonesia, beberapa institusi yang dibelakangnya terdapat ideologi keagamaan tertentu harus dipertimbangkan. Muhammadiyah, NU, Departemen Agama, dan lembaga-lembaga independen merupakan aktor-aktor penting dalam pergumulan tersebut. Kecuali Departemen Agama,

⁴⁴Ibid., 7.

⁴⁵Ibid., 8-9.

⁴⁶Ibid.

organisasi-organisasi sosial keagamaan telah melakukan modernisasi pendidikan Islam, sekaligus melakukan pergumulan dengan tetap mempertahankan identitas, jauh sebelum kemerdekaan.⁴⁷

Jalan modernisasi pendidikan Islam yang ditempuh Muhammadiyah tercermin dalam konsep “HIS met de Qur’an”. Sebagai kelompok Muslim reformis, Muhammadiyah menjadikan sistem pendidikan gaya Belanda dengan tambahan mata pelajaran Islam sebagai model lembaga pendidikan Islam modern. Muhammadiyah meletakkan materi keislaman dalam sebuah wilayah tersendiri yang diwadahi dalam mata pelajaran ke-Muhammadiyah-an, dan mata pelajaran keislaman lain seperti akidah, sejarah Islam, dan Alquran. Dalam materi-materi tersebut, konsep tentang *ijtihād*, *taqlīd*, *bid’ah*, *khurafāt*, dan *amr bi al-ma’rūf wa al-nahy ‘an munkar*, mendapat tempat untuk dilestarikan. Sikap Muhammadiyah sangat positif dalam merespon modernitas, terutama bidang pendidikan. Berdasarkan sikap ini, Muhammadiyah memilih model sekolah modern sebagai jembatan untuk mentransformasikan masyarakat Muslim Indonesia menjadi masyarakat modern dengan ideologi keagamaan rasional yang diindikasikan dengan penerimaan ijtihad dan penolakan taklid.⁴⁸

Di lingkungan NU sendiri, ideologi keagamaan Ahlus Sunnah wal Jama’ah—sebagaimana dirumuskan Kiai Hasyim Asy’ari—memiliki posisi sentral dalam organisasi. NU sendiri pada mulanya dimaksudkan sebagai gerakan yang bertendensi mempertahankan ideologi keagamaan tersebut dari kritisisme kaum Muslim reformis. Karena posisi ideologi keagamaan ahl Sunnah wa al-Jama’ah yang demikian sentral, NU menjadikan pesantren sebagai semacam “*guardian of the faith*”. Oleh karena itu, dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, kalangan pimpinan NU—yang sekaligus pimpinan pesantren—bersikap hati-hati. Mereka mengadopsi modernisasi sejauh mendukung—atau minimal tidak mengganggu—ideologi keagamaan sentral tersebut.⁴⁹

Oleh karena itu, dalam konteks pesantren NU, tidak seluruh pesantren melakukan modernisasi dengan mengadopsi sistem pendidikan modern. Sebagian besar pesantren mengembangkan sistem madrasah, bahkan sebagian diantaranya mengembangkan sistem sekolah umum. Akan tetapi, sistem pendidikan tradisional pesantren dalam bentuk penggajian kitab kuning, tetap dipertahankan. Tidak hanya cukup dengan memasukkan mata pelajaran ke-NU-an di madrasah dan sekolah umum, kalangan pesantren merasa perlu mewariskan identitas pesantren,⁵⁰ berupa khazanah

⁴⁷Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20*, 341.

⁴⁸*Ibid.*, 342.

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Mewariskan identitas pesantren dalam rangka menjadi tradisinya. Tradisi-tradisi itu diantaranya: (1) rihlah ilmiah, (2) menulis buku, (3) meneliti, (4) membaca kitab kuning,

intelektual Islam kitab kuning, kepada generasi mendatang. NU membangun lembaga pendidikan Islam modern dan diletakkan “sangkar” yang berada di bawah kontrol pimpinan pesantren.⁵¹

Sementara itu “Persatuan Islam”, walaupun pada saat itu ada juga yang memberikan nama “Permoefakatan Islam”. Organisasi ini didirikan pada 12 September 1923 M dengan Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus sebagai pimpinannya. Tanggal pendirian ini sesuai juga dengan sumber yang diperoleh Federspiel dari The Netherlands, Department van Kolonien, “Mohammedaansche Eeredienst”, Indische Verslag, 1930. Akan tetapi, pengakuan akan keberadaan Persatuan Islam oleh pemerintah Kolonial Belanda baru diperoleh pada 24 Agustus 1939, setelah M. Natsir selaku Ketua Umum terpilih pada Konferensi Persatuan Islam ke-3 di Bandung, bersikeras mengajukan surat pengakuan pada pemerintah Kolonial Belanda sejak 3 Agustus 1938.⁵²

Berbeda dengan organisasi-organisasi lain yang berdiri pada awal abad ke- 20, Federspiel menilai Persatuan Islam sebagai organisasi mempunyai ciri tersendiri, yaitu kegiatannya dititikberatkan pada pembentukan paham keagamaan. Adapun kelompok-kelompok yang telah diorganisasikan, misalnya Budi Utomo yang didirikan pada 1908, hanya bergerak dalam bidang pendidikan bagi orang-orang pribumi (khususnya bagi orang-orang Jawa), sementara Sarekat Islam yang diorganisasikan pada 1912 hanya bergerak dalam kemajuan bidang perdagangan dan politik. Muhammadiyah yang didirikan pada 1912, gerakannya diperuntukkan bagi kesejahteraan sosial masyarakat Muslim dan kegiatan pendidikan keagamaan.⁵³

Berbeda dengan organisasi-organisasi itu, Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam menyebutkan bahwa organisasi Persatuan Islam didirikan dengan berasaskan Islam yang dibentuk dengan dua tujuan, yaitu mengamalkan segala ajaran Islam dalam setiap segi kehidupan anggotanya dalam masyarakat, dan menempatkan kaum Muslim pada ajaran akidah dan syariah yang murni berdasarkan Alquran dan Sunnah. Dengan asas dan tujuan ini, Persatuan Islam merupakan organisasi kemasyarakatan yang berdasarkan Alquran dan Sunnah yang agenda-agenda kegiatannya (disebut dengan “Rencana Jihad”) mencakup dua hal. Pertama, rencana jihad umum yang meliputi: (a) mengadakan dan memelihara hubungan baik dengan segenap organisasi dan gerakan Islam di Indonesia dan seluruh dunia Islam; (b) melakukan *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-*

(5) berbahasa Arab, (6) mengamalkan Thariqat, (7) menghafal, (8) berpolitik, (9) ziarah kubur, (10) haulan, dan (11) tradisi silaturahmi. Abuddin Nata, *Sejarah Sosial Intelektual Islam dan Institusi Pendidikannya* (Jakarta: Rajagrafindo, 2012), 309-319.

⁵¹Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20*, 342-343.

⁵²Toto Suharto, *Pendidikan Berbasis Masyarakat Organik*, 133-134.

⁵³Ibid.

munkar sesuai Alquran dan Sunnah; (c) memberikan jawaban dan perlawanan atas tantangan aliran yang mengancam hidup keagamaan dan keislaman; (d) menghidupkan dan memelihara semangat jihad dan ijtihad; (e) membasmi munkarat, bidah, khurafat, tahayul, taklid, dan syirik; dan (f) mengadakan kegiatan-kegiatan dakwah, baik lisan, tulisan, maupun amal perbuatan dalam masyarakat yang sejalan dengan ajaran Alquran dan Sunnah. Kedua, rencana jihad khusus yang meliputi: mendidik para anggota untuk menjadi hamba Allah yang mengamalkan syariat Islam secara sempurna; membentuk para anggota menjadi *aṣḥāb wa al-ḥawārī al-islām* yang mampu bertindak sebagai mubalig dan mubalighah; memelihara dan memakmurkan masjid serta mushalla, memelihara wakaf serta melancarkan zakat; mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran untuk mengokohkan akidah, ibadah dan akhlak Islam; memperkaya perpustakaan Islam dengan mengadakan penerbitan-penerbitan keagamaan untuk tersebarinya paham kembali kepada Alquran dan Sunnah; dan mengadakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sejalan dengan tujuan organisasi dan tidak menyimpang dari ajaran Alquran dan Sunnah.⁵⁴

Persatuan Islam selaku organisasi Islam di Indonesia yang bergelut dalam bidang pendidikan dan dakwah telah menjalankan proses pendidikan dalam wadah yang disebut Pesantren Persatuan Islam. Pada masa kepemimpinan K.H.A. Latief Muchtar (1983-1997), Pesantren Persatuan Islam telah melaksanakan proses pendidikannya dengan mengikuti pedoman sistem pendidikan yang dibuat oleh Persatuan Islam. Pedoman ini merupakan kebijakan organisasi yang mengikat bagi seluruh kelembagaan Pesantren Persatuan Islam, mulai tingkat prasekolah hingga perguruan tinggi. Dengan pedoman ini, sistem pendidikan yang dilaksanakan Pesantren Persatuan Islam menjadi berbeda, dan dengan sendirinya tidak mengikuti sistem pendidikan yang ditentukan pemerintah, yang tampak dalam empat hal, yaitu bentuk kelembagaan, tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, dan pendanaan pendidikannya. Semua segi-segi pendidikan ini dilakukan secara mandiri dan otonom, yang karenanya pelaksanaan pendidikan yang dilakukan Pesantren Persatuan Islam ini disebut dengan pendidikan berbasis masyarakat. Dalam tinjauan politik pendidikan, khususnya pendidikan kritis, pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan yang kebijakan-kebijakan kependidikannya dibuat oleh masyarakat. Persatuan Islam dengan pesantrennya dalam kaitan ini adalah sebuah masyarakat, yaitu

⁵⁴Ibid.

masyarakat yang mengikat para anggotanya berdasarkan kepentingan (*community of interest*) agama, yaitu agama Islam⁵⁵.

Penutup

Periode kolonialisme menjadi momen penting bagi Indonesia khususnya sejarah ulama yang dikemudian hari berkontribusi besar dalam pembentukan gerakan sosial keagamaan dan pendidikan bersama-sama tokoh kunci pergerakan lainnya. Periode kolonial sejumlah institusi Muslim seperti madrasah, pesantren, surau dan dayah berkembang pesat. Ulama menjadi tokoh kunci gerakan sosial-keagamaan dan pendidikan Islam yang secara historis memiliki fondasi intelektual dan sosial yang mapan dalam mempertahankan posisi penting mereka dalam Islam di Indonesia. Lahirnya gerakan sosial keagamaan sebagian besar dipengaruhi berbagai gerakan, pemikiran dan aksi itu didorong oleh perjumpaan-perjumpaan yang sifatnya negatif terhadap dominasi pemerintah kolonial Belanda.[]

Daftar Pustaka

- Alfian. *Transformasi Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Aqsa, Darul. *Kiai Haji Mas Mansur, 1896-1946: Perjuangan dan Pemikiran*. Surabaya: Erlangga, 2005.
- Asrohah, Hanun. *Pelebagaan Pesantren: Melacak Asal Usul dan Perkembangan Pesantren di Jawa*, dalam *Akademika Jurnal Studi Islam* Volume 18, Nomor 2, Maret, ISSN: 1410-7457, Akreditasi Dirjen Dikti Diknas Nomor: 34/ DIKTI/ Kep/ 2003. Surabaya: PPs IAIN, 2006.
- Asrohah, Hanun. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Assyaukanie, Luthfi. *Ideologi Islam dan Utopia Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Freedom Institute, 2011.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1998.
- Burhanuddin, Jajat. *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*. Mizan Publika: Jakarta Selatan, 2012.
- Cahyono, Edi. *Zaman Bergerak di Hindia Belanda*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2003.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Memandu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.

⁵⁵Ibid., 125.

- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Jainuri, Achmad. *Orientasi Ideologi Gerakan Islam: Konservatisme, Fundamentalisme, Sekularisme, dan Modernisme*. Surabaya: Lembaga Pengkajian dan Masyarakat (LPAM), 2004.
- Laffan, Michael Francis. *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia*. London: RoutledgeCurzon, 1921.
- Maksum. *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1999.
- Mas'ud, Abdurrahman. *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- P.B.R Carey, "Satria dan Pandita", Some Note on Relationship Between Dipanagara's Keraton and Religious Supporters During the Java War (1825-1830)" dalam T Ibrahim Alfian, et.al., (ed), *Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis*. Yogyakarta: UGM Press, 1988.
- Sholahudin, Muhammad. *5 Ulama Internasional dari Pesantren*. Kediri: Nous Pustaka Utama, 2014.
- Subhan, Arief. *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Suharto, Toto. *Pendidikan Berbasis Masyarakat Organik: Pengalaman Pesantren Persatuan Islam*. Surakarta: Fataba Press, 2013.
- Trijono dkk. (Ed.). *Lambang. Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2004.
- Yatim, Badri, dkk. *Sejarah Perkembangan Madrasah*. Jakarta: Depag RI, 2000.
- Zuhairini, dkk.,. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara 2008.